



# RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN  
2025

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah S.W.T sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Tahun 2025

Rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Tahun 2025 mengacu pada pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Kami menyadari dokumen rencana kerja tahun 2025 ini dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata semoga dokumen rencana kerja ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan.

Tanjungpinang, Juli 2024



**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA TANJUNGPINANG**

**Drs. ABDUL KADIR IBRAHIM, MT**

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19660604 199412 1 004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU .....</b>	<b>6</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	6
2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .....	6
2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....	13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	24
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>25</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	25
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	25
3.3. Program dan Kegiatan.....	26
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>34</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Tahun 2023 .....	15
Tabel 2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Tanjungpinang .....	18
Tabel 2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	24
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	29

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Hubungan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	12
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Serta perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan.

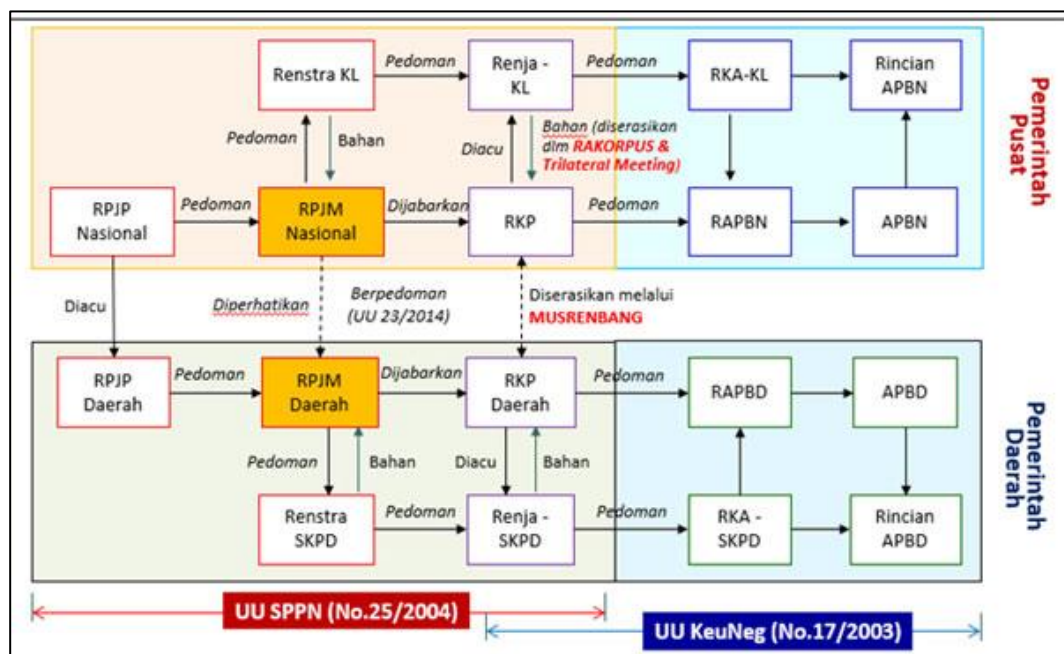
Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja PD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Renja PD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja PD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja PD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja PD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja PD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis

gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Keterkaitan antar dokumen tersebut dapat dilihat pada gambar berikut

**Gambar 1.1**  
**Hubungan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang merupakan salah satu dokumen perencanaan yang berisikan Program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang serta merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja 2024-2026

Dari keterkaitan perencanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025. Sedangkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

## **1.2. Landasan Hukum**

Sejumlah peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta



- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021.
  10. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Nomor 33 Tahun 2019)
  11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11).
  12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  13. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.
  14. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Tahun 2025 ini bermaksud untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang ini adalah :

1. Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dalam mencapai target pencapaian RPD Kota Tanjungpinang
2. Menyediakan tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang
3. Renja OPD sebagai landasan operasional dalam penyusunan program kegiatan yang mengacu pada visi dan misi Kota Tanjungpinang.

4. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah.
5. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen perencanaan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I      Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renja Tahun 2025.

**Bab II      Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu**

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal renja Perangkat Daerah tahun 2025, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**Bab III    Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan**

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta program dan kegiatan.

**Bab IV    Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**

Pada bagian ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 dan perkiraan capaian pada tahun berjalan, dengan mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah ditetapkan. Selanjutnya hasil kajian tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang bertujuan untuk mengukur kemampuan Satuan Polisi Pamong Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang pada tahun lalu (2023) dari 2 Program, 9 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan adalah:

##### **2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan pada Tahun 2023. Sehingga pencapaian kinerja pada Tahun 2023 mencapai 101,45%

##### **2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

###### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

###### **1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 44,368,200,- dan realisasi sebesar Rp. 40,839,220,- penyerapan sebesar 92.05%. Adapun indikator kinerja adalah Jumlah dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi program dan kegiatan OPD yang tersusun sebanyak 11 dokumen. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya laporan capaian kinerja dan kegiatan. Faktor

pendorong tercapainya target kinerja adalah OPD mampu menyusun dan menyediakan laporan capaian kinerja dan kegiatan

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.990.500,- dan realisasi sebesar Rp. 13.417.400,- penyerapan sebesar 89.51%. Adapun indikator kinerja adalah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah OPD yang tersusun sebanyak 4 dokumen. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya laporan capaian kinerja dan kegiatan.

## 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.383.709.828,- dan realisasi sebesar Rp. 17.232.850.624,- penyerapan sebesar 99.13%. Adapun indikator kinerja adalah Terpenuhinya kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai selama 1 tahun. Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN untuk 1 tahun. Faktor pendorong tercapainya target kinerja adalah OPD mampu memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan ASN.

## 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 538,678,000,- dan realisasi sebesar Rp.502,589,000,- penyerapan sebesar 93.30% . Adapun indikator kinerja adalah Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya. Faktor pendorong tercapainya target kinerja adalah OPD mampu memenuhi kebutuhan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya.
- Sub Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4,000,000,- dan realisasi sebesar Rp. 4,000,000,- penyerapan sebesar 100%. Adapun indikator kinerja adalah Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Faktor pendorong tercapainya target kinerja adalah OPD mampu memenuhi penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai.

## 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp.18,537,800,- dan realisasi sebesar Rp.7,413,803,- penyerapan sebesar 39.99%. Adapun indikator kinerja adalah Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.. Faktor pendorong tercapainya

target kinerja adalah OPD mampu memenuhi kebutuhan untuk operasional rutin kantor.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp.724,419,100,- dan realisasi sebesar Rp.563,036,746,- penyerapan sebesar 77.72%. Adapun indikator kinerja adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk 1 tahun. Faktor pendorong tercapainya target kinerja adalah OPD mampu memenuhi kebutuhan untuk operasional rutin kantor.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9,276,000,- dan realisasi sebesar Rp.9,250,953,- penyerapan sebesar 99.73%. Adapun indikator kinerja adalah Tersedianya peralatan rumah tangga. Faktor pendorong tercapainya target kinerja adalah OPD mampu memenuhi kebutuhan untuk operasional rutin kantor.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 449,120,000,- dan realisasi sebesar Rp. 436,984,854,- penyerapan sebesar 97.30%. Adapun indikator kinerja adalah tersedianya bahan logistic kantor selama 1 tahun. Faktor pendorong tercapainya target kinerja adalah OPD mampu memenuhi kebutuhan untuk operasional rutin kantor.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan pagu anggaran sebesar Rp.44,701,673,- dan realisasi sebesar Rp.40,053,925,- penyerapan sebesar 89.60%. Adapun indikator kinerja adalah tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun. Faktor pendorong tercapainya target kinerja adalah OPD memenuhi kebutuhan untuk operasional rutin kantor.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.9,248,000 ,- penyerapan sebesar 92.48%. Adapun indikator kinerja adalah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun. Faktor pendorong tercapainya target kinerja adalah OPD mampu memenuhi kebutuhan untuk operasional rutin kantor.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 478,779,700,- dan realisasi sebesar Rp.463,172,249,- penyerapan sebesar 96.74%. Adapun indikator kinerja adalah terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi

SKPD selama 1 tahun. Faktor pendorong tercapainya target kinerja adalah OPD mampu memenuhi kebutuhan untuk operasional rutin kantor.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran sebesar Rp. 156,634,000,- dan realisasi sebesar Rp. 136,940,000,- penyerapan sebesar 87.43%. Adapun indikator kinerja adalah Tersedianya mebel. Faktor pendorong tercapainya target kinerja adalah OPD mampu memenuhi kebutuhan untuk operasional rutin kantor.
- Sub Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 292,824,200,- dan realisasi sebesar Rp. 219,749,550,- penyerapan sebesar 75.04%. Adapun indikator kinerja Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya. Faktor pendorong tercapainya target kinerja adalah OPD mampu memenuhi kebutuhan untuk operasional rutin kantor.
- Sub Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 84,744,000,- dan realisasi sebesar Rp. 83,394,300,- penyerapan sebesar 98.41%. Adapun indikator kinerja adalah Tersedianya sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya. Faktor pendorong tercapainya target kinerja adalah OPD mampu memenuhi kebutuhan untuk operasional rutin kantor.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran sebesar Rp.123,873,100,- dan realisasi sebesar Rp. 112,407,038,- penyerapan sebesar 90.74%. Adapun indikator kinerja adalah tersedianya kebutuhan operasional rutin kantor selama 1 tahun. Hasil kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Faktor pendorong tercapainya target kinerja adalah OPD mampu memenuhi kebutuhan untuk operasional rutin kantor.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4,023,983,408,- dan realisasi sebesar Rp. 3,951,780,490,- penyerapan sebesar 98.21%. Adapun indikator kinerja adalah tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 1 tahun. Hasil kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk 1 tahun. Faktor pendorong tercapainya target kinerja adalah OPD mampu memenuhi kebutuhan untuk jasa tenaga pendukung.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 221,815,000,- dan realisasi sebesar Rp. 134,571,670,- penyerapan sebesar 60.67%. Adapun indikator kinerja adalah terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya selama 1 tahun. Hasil kegiatan ini adalah Terselenggaranya kebutuhan operasional rutin kantor untuk 1 tahun. Faktor pendorong tercapainya target kinerja adalah OPD mampu memenuhi kebutuhan untuk operasional rutin kantor.

**b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 817,971,950,- dan realisasi sebesar Rp. 763,873,330,- penyerapan sebesar 96.20%. Adapun indikator kinerja adalah jumlah duta pelajar tertib yang dibentuk sebanyak 48 Orang, jumlah even hari besar keagamaan yang diamankan sebanyak 30 Even, jumlah pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sebanyak 53 kali, jumlah personel pamong wilayah yang dibentuk sebanyak 22 Orang, jumlah rapat koordinasi pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sebanyak 4 Kali. Faktor pendorong tercapainya target kinerja adalah OPD mampu melaksanakan pengamanan disetiap pelaksanaan hari besar keagamaan, OPD mampu melaksanakan pembinaan dan penyuluhan serta pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dengan pagu anggaran Rp.2,819,840,449.- dan realisasi sebesar Rp. 2,749,414,405.- penyerapan sebesar 97.50%. Adapun indikator kinerja adalah Jumlah Anggota Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas nya sebanyak 1466 Orang. Jumlah Anggota Satpol PP yang dilakukan penilaian jabatan fungsional sebanyak

91 Orang. Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat PKA sebanyak 1 Orang. Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara sebanyak 25 Orang. Jumlah Anggota Satpol yang mengikuti Diklat Satgas Kebencanaan sebanyak 25 Orang. Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Bimtek Korps Musik sebanyak 50 Orang. Jumlah PPNS dan Intel yang terlatih sebanyak 13 Orang. Jumlah SDM Satpol PP yang mengikuti pelatihan bela diri sebanyak 20 Orang. Faktor pendorong tercapainya target kinerja adalah OPD mampu melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas.

- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda/Perkada dengan pagu anggaran Rp. 6,041,912,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- dengan penyerapan 0. Adapun indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkada. Faktor penghambat tercapainya target kinerja adalah tidak adanya warga yang terkena dampak dari Perda dan Perkada oleh anggota Satpol PP.
2. Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
- Sub Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dengan pagu anggaran Rp. 332,477,025,- dan realisasi sebesar Rp. 217,645,000,- penyerapan anggaran sebesar 65.46%. Adapun indikator kinerja adalah Terbentuknya pemahaman Peraturan daerah kepada Masyarakat sebanyak 1 Laporan. Faktor pendorong tercapainya target kinerja adalah OPD mampu melaksanakan kegiatan.
  - Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dengan pagu anggaran Rp. 136,233,000.- dan realisasi sebesar Rp.119,821,040.- penyerapan sebesar 87.95% . Adapun indikator kinerja adalah Jumlah operasi persuasif yustisia dan non yustisia yang dilakukan sebanyak 12 laporan. Faktor pendorong tercapainya target kinerja adalah OPD mampu melaksanakan kegiatan.



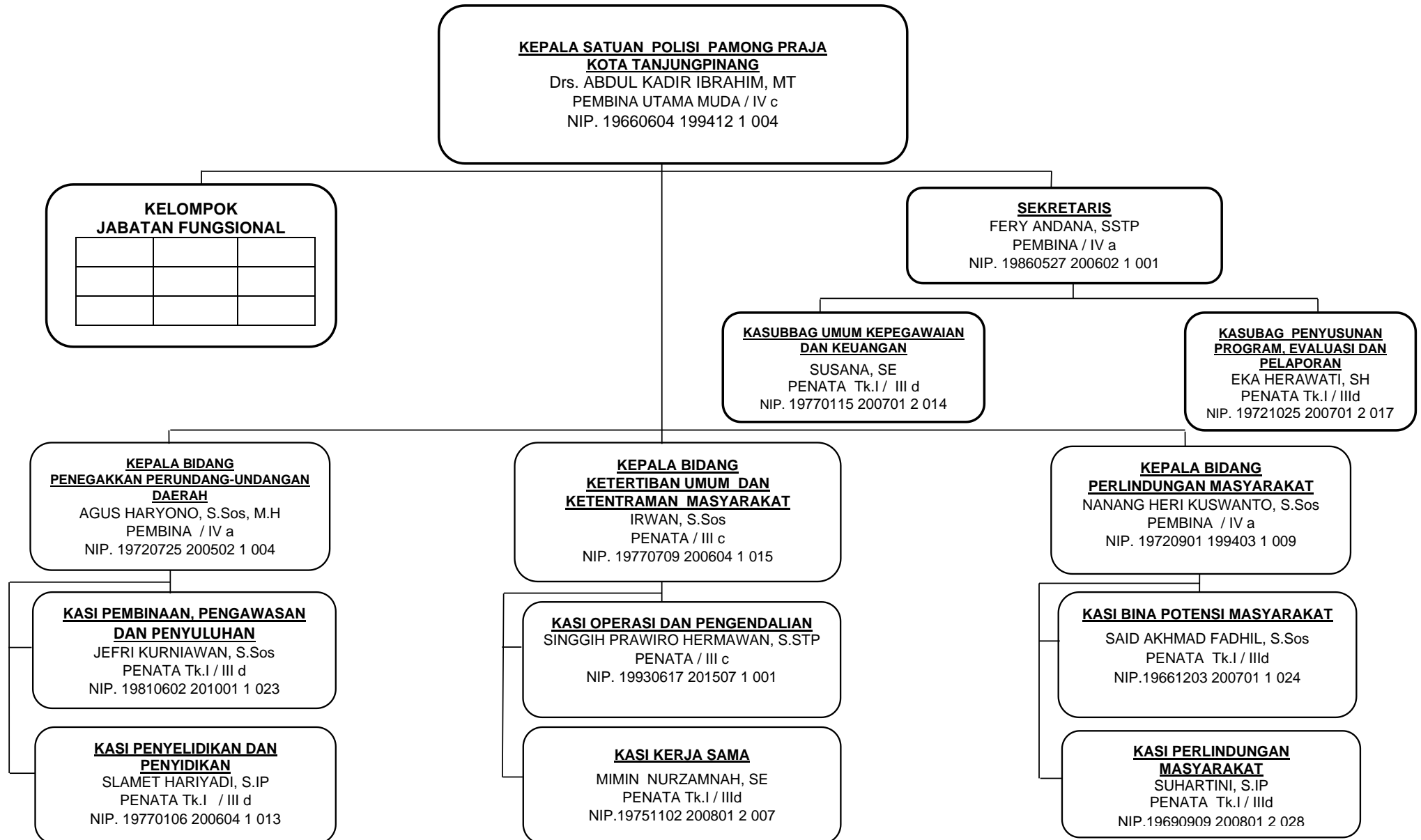
## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Susunan organisasi Satpol PP Kota Tanjungpinang adalah :

1. Kepala Satuan
2. Sekretaris
3. Bidang
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Walikota; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.



Pencapaian kinerja pelayanan organisasi perangkat daerah diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah dirumuskan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode 2018 - 2023 sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 yaitu dengan tujuan meningkatkan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat dengan satu sasaran yaitu (1) meningkatnya penegakan Peraturan Daerah. Adapun kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Tahun 2023**

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	SPM/ Standar Nasional	Formula/ Rumus	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Status
				2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Cakupan rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	1 orang setiap RT atau sebutan lainnya	Jumlah Satlinmas dibagi jumlah RT	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3	1,6	2,1		-	ST
2	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	Jumlah pelanggaran Perda/ Perkada yang diselesaikan dibagi pelanggaran Perda/Perkada yang dilaporkan atau diawasi dikali 100	80	85	90	90	95	95.04	87.46		-	ST
3	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3x patroli dalam sehari	Jumlah kelompok patroli dikalikan 3 kali patroli (seluruh wilayah Kota Tanjung- pinang)	9 kali/ hari	9 kali/ hari	9 kali/ hari	9 kali/ hari	9 kali/ hari	6 kali/ hari	6 kali/ hari		-	S
4	Persentase even yang dilakukan pengamanan oleh Satpol PP dalam keadaan aman	-	Jumlah even yang dilakukan pengamanan oleh Satpol PP dalam keadaan aman dibagi jumlah even dikali 100	80	85	90	90	95	100	100		-	ST
5	Persentase Warga Negara Yang memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Perda dan Perkada	-	Jumlah warga negara yang terkena dampak akibat dari penegakan hokum Perda dan Perkada yang memperoleh layanan dibandingkan dengan jumlah warga negara yang terkena dampak akibat dari penegakan Perda dan Perkada) X 100	100	100	100	100	100	100	100		-	ST

6	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	Jumlah pelanggaran Perda/ Perkada yang diselesaikan dibagi pelanggaran Perda/Perkada yang dilaporkan dikali 100	-	-	-	-	-	-	-	93	93	
7	Persentase Penerapan SPM Trantibumlinmas		Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang mengikuti diklat dibagi Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas dikali 100	-	-	-	-	-	-	-	55	58	
			Jumlah Sarpras minimal Satpol PP dan Satlinmas yang tersedia dibagi jumlah Sarpras minimal yang dibutuhkan dikali 100	-	-	-	-	-	-	-	75	78	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/ Kota dibagi Jumlah warga negara yang terkena dampak dikali 100	-	-	-	-	-	-	-	100	100	

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk dan mempunyai tugas untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang sebagai kepanjangan tangan Walikota Tanjungpinang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat. Suasana tentram dan tertib menjadi modal dasar baik dalam menjalankan roda pemerintahan maupun roda perekonomian, dengan kata lain apabila kondisi ketentraman dan ketertiban tidak terselenggara dengan baik maka penyelenggaraan pemerintahan dan aktifitas perekonomian tidak dapat berjalan optimal.

Terdapat beberapa hal yang menjadi isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang yaitu adanya permasalahan dan penghambat dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Minimnya sosialisasi Perda dan Perkada kepada Masyarakat;
2. Akses Masyarakat terhadap Perda dan Perkada belum optimal;
3. Belum Optimalnya Pengaturan Sanksi terhadap Perda dan Perkada;
4. Lemahnya pengawasan terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
5. Masih Kurangnya Kompetensi dan jumlah personil Satpol PP dan Satlinmas;
6. Terbatasnya sarana dan prasarana minimal Satpol PP dan Satlinmas.

## 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

**Tabel 2.2**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**  
**Kota Tanjungpinang**

**Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2025		ANALIS HASIL KEBUTUHAN	
					TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4		8	9	15	16
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah			36,936,602,064.62		37,295,693,088
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	75		29,851,782,064.62		32,207,911,088
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	99	47,190,000.00	99	36,757,050
	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	29,040,000.00	7	20,267,500
	1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	18,150,000.00	5	16,489,550
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	99	19,256,396,447.09	99	18,218,091,405
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	150	19,256,396,447.09	150	18,218,091,405
	1.5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	609,829,230.00	95	617,045,337
	1.5.01.01.2.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	270	576,829,230.00	270	606,045,337
	1.5.01.01.2.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	33,000,000.00	6	11,000,000

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2025		ANALIS HASIL KEBUTUHAN	
					TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4		8	9	15	16
	<b>1.5.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>95</b>	<b>2,394,366,964.33</b>	<b>95</b>	<b>2,364,652,620</b>
	<b>1.5.01.01.2.06.01</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	12	22,430,738.00	12	22,430,738
	<b>1.5.01.01.2.06.02</b>	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	12	1,103,884,452.00	12	1,103,884,452
	<b>1.5.01.01.2.06.03</b>	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket	12	11,223,960.00	12	11,000,000
	<b>1.5.01.01.2.06.04</b>	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	12	634,301,360.00	12	605,000,000
	<b>1.5.01.01.2.06.05</b>	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	12	54,089,024.33	12	55,000,000
	<b>1.5.01.01.2.06.06</b>	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	12	12,100,000.00	12	11,000,000
	<b>1.5.01.01.2.06.07</b>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	556,337,430.00	12	556,337,430
	<b>1.5.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>90</b>	<b>1,936,908,767.00</b>	<b>90</b>	<b>6,185,215,000</b>
	<b>1.5.01.01.2.07.01</b>	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	0	-	1	700,000,000
	<b>1.5.01.01.2.07.02</b>	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	7	800,000,000.00	7	800,000,000.00
	<b>1.5.01.01.2.07.05</b>	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	4	450,000,000.00	4	475,715,000.00
	<b>1.5.01.01.2.07.06</b>	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	39	572,500,000.00	46	599,500,000
	<b>1.5.01.01.2.07.09</b>	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0	-	6	3,460,000,000
	<b>1.5.01.01.2.07.10</b>	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	114,408,767.00	1	150,000,000

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2025		ANALIS HASIL KEBUTUHAN	
					TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4		8	9	15	16
	1.5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	98	5,097,020,656.20	98	4,105,673,176
	1.5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	210,489,961.00	12	147,727,800
	1.5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	4,886,530,695.20	12	3,957,945,376
	1.5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	98	510,070,000.00	98	680,476,500
	1.5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	44,000,000.00	1	44,000,000
	1.5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny	Unit	8	66,000,000.00	8	183,221,500
	1.5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	2	55,000,000.00	2	55,000,000
	1.5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	Unit	39	15,070,000.00	80	68,255,000
	1.5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	220,000,000.00	1	220,000,000
	1.5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2	110,000,000.00	2	110,000,000



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2025			ANALIS HASIL KEBUTUHAN	
				SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4		8	9	15	16
2.	1.5.01.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	93	7,084,820,000.00		5,087,782,000
			Persentase penerapan SPM Trantibumlinmas	Persen	76			
	1.5.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	90	5,664,820,000.00	90	3,967,782,000
	1.5.01.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan	Kasus	96	1,086,620,000.00	96	1,080,614,000
	1.5.01.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	93	227,200,000.00	93	227,200,000
	1.5.01.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	12	17,000,000.00	12	17,000,000
	1.5.01.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	500,000,000.00	2	300,000,000
	1.5.01.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	617	3,210,000,000.00	1793	1,726,968,000
	1.5.01.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	13	300,000,000.00	13	300,000,000
	1.5.01.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	2	300,000,000.00	2	300,000,000.00
	1.5.01.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	2	24,000,000.00	2	16,000,000

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2025			ANALIS HASIL KEBUTUHAN	
				SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4		8	9	15	16
	1.5.01.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persen	93	1,200,000,000.00	93	900,000,000
	1.5.01.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	1	250,000,000.00	1	250,000,000
	1.5.01.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	50	600,000,000.00	30	300,000,000.00
	1.5.01.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	68	350,000,000.00	68	350,000,000.00
	1.5.01.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persen	55	220,000,000.00	58	220,000,000
	1.5.01.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	6	220,000,000.00	6	220,000,000.00
J U M L A H						36,936,602,064.62		37,295,693,088

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja bertujuan untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang bersentuhan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang. Berikut adalah rumusan rancangan kerja yang telah disepakati pada forum Musrenbang Kota Tanjungpinang dan akan diakomodir pada Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Tahun 2025.

**Tabel 2.3**  
**Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembangunan/ Rehab Pos Kamling	Tanjung Sebauk, RW 06, Kel. Senggarang, Kec. Tanjungpinang Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan	1 Unit			
2	Pembangunan/ Rehab Pos Kamling	Perum. Kijang Kencana III RT.001/ RW. IX Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit			
3	Pembangunan/ Rehab Pos Kamling	Perum. Bumi Indah RT 03 / RW 004 Kel. Air Raja, Kec. Tanjungpinang Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit			

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 ayat (1) yaitu untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar dalam ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Hal ini selaras dengan visi Kementerian Dalam Negeri yaitu ***“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”*** yang kemudian ditekankan secara khusus melalui misi ke-2 yaitu ***“Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketenteraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan”***. Sedangkan tujuan Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang tercantum pada tujuan pertama yaitu ***“Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1). Dan dalam sasaran ke empat yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4)”***

##### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, berupa hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Melalui penetapan tujuan diperoleh gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang. Penjabaran dari tujuan secara spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi, di mana fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi yang bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tujuan :** Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

**Indikator Tujuan :** Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas

**Sasaran :**

1. Meningkatnya penegakkan perda dan perkada
2. Meningkatnya penerapan SPM trantibumlinmas secara optimal

**Indikator Sasaran :**

1. Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan dibagi Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan dikali 100
2. Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang mengikuti Diklat dibagi jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas dikali 100
3. Jumlah Sarpras minimal Satpol PP dan Satlinmas yang tersedia dibagi jumlah Sarpras minimal yang dibutuhkan dikali 100
4. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota dibagiJumlah warga negara yang terkena dampak dikali 100

**3.3. Program dan Kegiatan**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang. Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentrman masyarakat dan perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang memiliki peran penting dalam upaya pencapaian visi dan misi Kota Tanjungpinang. Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke empat Kota Tanjungpinang yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang telah merencanakan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan total pagu indikatif sebesar Rp 46,679,038,604,- (empat puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) yang terdistribusi pada 2 program dan 10 kegiatan dan 38 sub kegiatan sebagai berikut :

## **I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
3. Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - f. Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
  - c. Pengadaan Mebel
  - d. Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
  - e. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
  - f. Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pemeliharaan Mebel
  - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **II. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

1. Penganagan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
  - b. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
  - c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
  - d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polis Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
  - f. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum
  - g. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - h. Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Peraturan daerah dan Perkada
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
  - a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
  - b. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota
  - c. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Pengembangan Kapasitas dan Karier PNS

Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU 2026	
					TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4		8	9	11	15	16
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah			37,436,602,065.00			39,173,030,271
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	75		32,169,602,065.00			32,166,210,271
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	99	50,000,000.00	APBD	99	51,909,000
	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	30,000,000.00	APBD	7	31,944,000
	1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	20,000,000.00	APBD	5	19,965,000
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	99	21,181,018,917.80	APBD	99	21,182,036,092
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	150	21,181,018,917.80	APBD	150	21,182,036,092
	1.5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	583,000,000.00	APBD	95	658,062,153
	1.5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	270	550,000,000.00	APBD	280	621,762,153
	1.5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	33,000,000.00	APBD	6	36,300,000



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU 2026	
					TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4		8	9	11	15	16
	1.5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Persen	95	1,817,100,000.00	APBD	95	2,633,803,661
	1.5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	12	30,000,000.00	APBD	12	24,673,812
	1.5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	12	500,000,000.00	APBD	12	1,214,272,897
	1.5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket	12	20,000,000.00	APBD	12	12,346,356
	1.5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	12	600,000,000.00	APBD	12	697,731,496
	1.5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	12	55,000,000.00	APBD	12	59,497,927
	1.5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	12	12,100,000.00	APBD	12	13,310,000
	1.5.01.01.2.06.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	600,000,000.00	APBD	12	611,971,173
	1.5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	2,655,000,000.00	APBD	90	1,472,599,644
	1.5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	400,000,000.00	APBD	0	-
	1.5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	400,000,000.00	APBD	0	800,000,000.00
	1.5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	16	315,000,000.00	APBD	0	-
	1.5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	30	320,000,000.00	APBD	38	546,750,000
	1.5.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	7	1,020,000,000.00	APBD	0	-
	1.5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	200,000,000.00	APBD	2	125,849,644

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU 2026	
					TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4		8	9	11	15	16
	1.5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	98	5,138,483,147.20	APBD	98	5,606,722,722
	1.5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	250,000,000.00	APBD	12	231,538,957
	1.5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	4,888,483,147.20	APBD	12	5,375,183,765
	1.5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	98	745,000,000.00	APBD	98	561,077,000
	1.5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	60,000,000.00		1	48,400,000
	1.5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny	Unit	13	200,000,000.00		8	72,600,000
	1.5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	2	55,000,000.00	APBD	2	60,500,000
	1.5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	Unit	80	100,000,000.00	APBD	80	16,577,000
	1.5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	220,000,000.00	APBD	1	242,000,000
	1.5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2	110,000,000.00	APBD	2	121,000,000

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU 2026	
					TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4		8	9	11	15	16
2.	1.5.01.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	93	5,267,000,000.00	APBD		7,006,820,000
			Persentase penerapan SPM Trantibumlinmas	Persen	78				
	1.5.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	90	3,997,000,000.00	APBD	90	5,429,820,000
	1.5.01.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan	Laporan	96	1,500,000,000.00	APBD	96	1,101,620,000
	1.5.01.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	93	150,000,000.00	APBD	93	227,200,000
	1.5.01.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	12	17,000,000.00	APBD	12	17,000,000
	1.5.01.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	200,000,000.00	APBD	2	600,000,000
	1.5.01.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	1785	1,710,000,000.00	APBD	567	2,710,000,000
	1.5.01.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	13	100,000,000.00	APBD	13	350,000,000
	1.5.01.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	3	300,000,000.00	APBD	4	400,000,000.00
	1.5.01.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	2	20,000,000.00	APBD	2	24,000,000

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU 2026	
					TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4		8	9	11	15	16
	1.5.01.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persen	93	1,050,000,000.00		93	1,352,000,000
	1.5.01.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	1	250,000,000.00	APBD	1	300,000,000
	1.5.01.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	15	500,000,000.00	APBD	50	700,000,000.00
	1.5.01.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	68	300,000,000.00	APBD	68	352,000,000.00
	1.5.01.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persen	55	220,000,000.00	APBD	58	225,000,000
	1.5.01.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	6	220,000,000.00	APBD	6	225,000,000.00
J U M L A H						37,436,602,065.00			39,173,030,271

## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, program dan sasaran tahunan yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026. Target kinerja yang ada pada rencana kerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai pada semua indikator kinerja masing-masing kegiatan. Target kinerja menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Melalui Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Kota Tanjungpinang Tahun 2025 diharapkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mendukung Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Tanjungpinang yaitu ***"Mewujudkan Kota Tanjungpinang sebagai Kota Pendidikan, Pusat Wisata Budaya dan Perdagangan Terdepan"***.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA TANJUNGPINANG



Drs. ABDUL KADIR IBRAHIM, MT  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19660604 199412 1 004